

## Ringkasan Dampak Legasi

# PRISMA

# Kebijakan



Kementerian PPN/  
Bappenas



Australian Government

Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (PRISMA) adalah kemitraan antara Pemerintah Australia (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT) dan Pemerintah Indonesia (BAPPENAS).

# Daftar Isi

Pengantar ..... 3

Prisma dalam Angka ..... 4

---

## POLICY INITIATIVES

Universitas memasukkan pengalaman PRISMA ke dalam program-program akademis mereka dan dengan berperan sebagai gudang pengetahuan dan pelajaran PRISMA ..... 6

Bappenas merumuskan agenda pembangunan sektor pangan dan pertanian tahun 2025–2029 dalam RPJMN berdasarkan bukti kebijakan yang kuat ..... 9

Kementerian Pertanian mereformasi dan mengimplementasikan standar pakan sapi yang direvisi... 12

Pemerintah dan akademisi meningkatkan kapasitas implementasi pengembangan sistem pasar (*Market System Development/MSD*) ..... 15

Kementerian Pertanian mempercepat adopsi Inseminasi Buatan (IB) di sektor babi dengan meningkatkan standar dan prosedur operasi untuk semen babi serta standardisasi pelatihan IB dan sertifikasi untuk inseminator..... 18

Pemerintah Provinsi NTT merumuskan RPJMD 2025-2029 untuk sektor pertanian menggunakan wawasan kebijakan dan pengolahan data yang lebih baik dengan melibatkan bukti dan informasi sistem pasar dari intervensi PRISMA ..... 21

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sumenep meningkatkan sistem perencanaan subsidi benih jagung..... 24

---

Pelajari lebih lanjut ..... 27

# Pengantar

**Ringkasan Dampak Legasi—Kebijakan ini menyajikan hasil dan pencapaian utama dari dukungan kebijakan Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (PRISMA) bagi Pemerintah Indonesia dan upaya untuk mengintegrasikan bukti program ke program akademik.**

**P**PRISMA adalah program pengembangan sistem pasar yang mengubah produktivitas pertanian wilayah timur Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2024, PRISMA bermitra dengan 273 mitra sektor swasta dan pemerintah Indonesia untuk mengatasi hambatan pasar dalam pertumbuhan dan membuka akses petani atau peternak skala kecil terhadap produk dan layanan yang meningkatkan produktivitas. Selama 11 tahun, PRISMA telah memberikan manfaat bagi 1,48 juta rumah tangga petani atau peternak skala kecil sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

Salah satu keunggulan utama dari pendekatan pengembangan sistem pasar (Market System Development atau MSD) adalah kemampuannya dalam mendorong reformasi kebijakan yang pragmatis. PRISMA membagikan berbagai bukti, pembelajaran, dan pengalaman dengan para pembuat kebijakan serta pihak-pihak yang memengaruhi kebijakan (seperti universitas, wadah pemikir, dan asosiasi). Upaya ini menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bisnis dan memungkinkan para petani atau peternak untuk terus meningkatkan produktivitas serta ketahanan mereka terhadap perubahan iklim.

Sebagai contoh, PRISMA mendukung reformasi standar nasional untuk pakan konsentrat agar lebih fleksibel dan ramah bisnis bagi pabrik pakan UMKM dan peternak skala kecil. Dukungan ini mendorong Kementerian Pertanian untuk merevisi tiga peraturan utama terkait pakan yang diharapkan dapat disetujui dan diimplementasikan pada tahun 2024. Peraturan ini berpotensi membuka peluang bagi 13,6 juta peternak.

PRISMA mendukung studi latar belakang, penyusunan indikator, dan studi kebijakan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dengan melibatkan suara sektor swasta, pembuat kebijakan dapat mengatasi tantangan khusus industri dengan lebih baik dan memanfaatkan kesempatan yang muncul sekaligus menyusun kebijakan yang lebih efektif dan responsif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Secara keseluruhan, dukungan kebijakan yang diberikan oleh PRISMA merupakan jalur penting untuk peningkatan dan pertumbuhan. Landasan yang dibangun melalui PRISMA akan terus memberikan dampak positif pada berbagai sektor di tahun-tahun mendatang.



**Ringkasan Dampak Legasi – Kebijakan ini dapat dibaca bersama dengan Ringkasan Dampak Legasi PRISMA – Sektor**, buku kisah para petani dan peternak, studi kasus pertanian cerdas iklim, serta alat, buku pedoman, dan panduan GEDSI. Bersama-sama, semua sumber informasi tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai legasi PRISMA.



# PRISMA dalam Angka



**11**

Tahun Program  
dari 2013–2024



**6**

Provinsi di Wilayah  
Timur Indonesia



**12**

Komoditas Pertanian  
(sampai dengan  
tahun 2024)



## Dampak

### Komunitas petani atau peternak skala kecil

**1.485.093**



Rumah tangga petani atau peternak skala kecil mengalami peningkatan pendapatan.

**148%**



Lebih banyak dari target akhir program PRISMA, yaitu 1 juta rumah tangga petani atau peternak skala kecil

**918.648**



Rumah tangga petani miskin (di bawah garis kemiskinan paritas daya beli sebesar 5,50 USD) mengalami peningkatan pendapatan

**4,01 juta**



Rumah tangga petani atau peternak memiliki akses ke, atau informasi tentang, inovasi untuk meningkatkan produktivitas

**1.375.034**



Petani perempuan skala kecil mengalami peningkatan pendapatan

**59%\***



Perempuan mengalami peningkatan pendapatan berkat input dan layanan yang ditawarkan oleh mitra PRISMA

**2**



Bisnis sedang menguji coba model bisnis yang inklusif bagi masyarakat adat

**22%**



Petani atau peternak dari survei dampak sosial PRISMA menginvestasikan peningkatan pendapatannya untuk pendidikan anak-anak mereka

**476**



Penyandang disabilitas mengalami peningkatan pendapatan

**901.911**



Orang merupakan pemuda (usia 18–35 tahun)

**123%**



Peningkatan pendapatan untuk rumah tangga petani atau peternak skala kecil

**32%\***



Perempuan memiliki beban kerja yang lebih mudah

**24%\***



Perempuan telah memperluas kepemimpinan dan jaringan sosial mereka

**31%**

Petani atau peternak dari survei dampak sosial PRISMA berinvestasi dalam kegiatan ekonomi



\*dari survei terhadap 2.422 perempuan di 12 sektor sejak tahun 2020

## Investasi berkelanjutan



**273**

Mitra sektor swasta dan pemerintah



**199**

Mitra sektor swasta mengadopsi model bisnis inklusif



**180**

Bisnis di tingkat daerah mendukung model bisnis inklusif



**105**

Nonmitra meniru inovasi



**78%**

Kemitraan tertutup melanjutkan inovasi pascakolaborasi



**148 juta AUD**

Peningkatan pendapatan untuk mitra



**311 juta AUD**

Investasi sektor swasta dimanfaatkan



**15.142**

Usaha kecil dan menengah mengalami peningkatan pendapatan



**247 juta AUD**

Peningkatan pendapatan untuk usaha kecil dan menengah



#PETANI MAJU  
#FUTURE FARMERS

## Perubahan iklim



**139.229 ton**

Pengurangan emisi setara karbon



**55,3%**

Intervensi mencakup elemen perubahan iklim, di mana 74,8% memiliki elemen mitigasi, 5,2% memiliki elemen adaptasi, dan 20% memiliki elemen mitigasi dan adaptasi.

## Melanjutkan legasi



**179**

Keterlibatan kebijakan



**2**

Universitas telah mengintegrasikan bukti PRISMA ke dalam kurikulum mereka



**2,68 juta**

Juta orang dijangkau melalui kampanye Petani Maju/*Future Farmer* yang mempromosikan inovasi



**197**

Artikel media mempromosikan inovasi dan bisnis inklusif



**7.9 juta**

Orang berhasil dijangkau (2022–2024)



**Jaringan staf ahli**

Siap memasuki sektor swasta dengan pengetahuan yang lebih baik tentang pengembangan ekosistem pertanian

## Inisiatif kebijakan

# Universitas memasukkan pengalaman PRISMA ke dalam program-program akademis mereka dan dengan berperan sebagai gudang pengetahuan dan pelajaran PRISMA

## Konteks

PRISMA mengidentifikasi akademisi sebagai institusi utama yang dapat secara mandiri menyebarluaskan hasil pembelajaran PRISMA setelah program berakhir. Hal ini sejalan dengan konsep kemitraan *triple helix* yang mendorong kolaborasi antar lembaga akademis, pemerintah, dan industri untuk memacu inovasi seputar pembangunan ekonomi dan sosial.<sup>1</sup> Dengan memasukkan pelajaran dan kisah sukses dari industri ke materi pendidikan dan program akademis, universitas dapat memberikan wawasan konkret kepada mahasiswa tentang penerapan dan tantangan di dunia nyata dalam sektor pertanian sekaligus mengatasi masalah mendesak seputar kesenjangan keterampilan antara lulusan universitas dan kebutuhan industri.<sup>2</sup>

Selain itu, terdapat kebutuhan khusus untuk menyertakan lebih banyak pengetahuan praktis seputar bisnis inklusif dan inisiatif pertanian cerdas iklim dalam program akademis, mengingat hal ini merupakan area fokus yang muncul di beberapa universitas, seperti Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Nahdlatul Wathan Mataram (UNWM).

*Setelah melihat proses pengembangan kurikulum pendidikan berbasis capaian pembelajaran (OBE) [di UNWM] yang memasukkan pendekatan pengembangan sistem pasar, saya yakin bahwa UNWM adalah satu-satunya universitas di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah VIII yang menaati pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dicapai dengan melibatkan pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah, alumni, dan industri di seluruh prosesnya.*

**Dr. Yeyen Komalasari, SE., MM., CHRA,**  
Fasilitator Kurikulum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII (LLDIKTI VIII)



Pj Rektor Universitas Nahdhatul Wathan (UNW) Mataram, Prof. Agil Al-Idrus, menyerahkan buku ajar *Bisnis Agrotechno* kepada Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas, Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D.



## Dukungan PRISMA

Karena PRISMA sebelumnya pernah berkolaborasi dengan UB dalam beberapa ringkasan kebijakan dan uji coba teknologi pemberian pakan sapi yang inovatif dan ramah iklim, seperti Emission Control Block (ECB), dan dengan UNWM dalam program inkubator bisnis inklusif, PRISMA memanfaatkan hubungan ini dan memfokuskan dukungannya pada UB dan UNWM. Tujuannya adalah mengarsipkan dan membagikan pengetahuan PRISMA secara lebih luas serta memastikan bahwa UB dan UNWM meningkatkan materi pendidikan dan kurikulum akademis mereka. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan menanamkan pelajaran PRISMA tentang bisnis inklusif dan pertanian ramah iklim serta dengan memiliki sumber daya tambahan untuk terus mengembangkan dan menerapkan program akademis yang lebih baik.

PRISMA mengupayakan hal ini dengan (a) membagikan produk pengetahuannya (misalnya, ringkasan pembelajaran, pemantauan pasar, dan ringkasan pasar) melalui perpustakaan daring UB; (b) membantu UB mengembangkan dan menguji protokol peternakan cerdas iklim yang akan digunakan sebagai tolok ukur saat peneliti universitas atau mahasiswa melakukan uji coba praktik cerdas iklim pada masa mendatang; dan (c) membantu UNWM merevisi kurikulumnya dengan memperkaya mata kuliah kewirausahaannya dengan pendekatan pengembangan sistem pasar (MSD) dan wawasan dari program inkubator bisnis inklusif.



## Pencapaian Utama

Dukungan yang diberikan PRISMA mendorong UB dan UNWM untuk mengintegrasikan pengalaman PRISMA, khususnya yang terkait dengan praktik cerdas iklim dan bisnis inklusif, ke dalam program akademik mereka. UB juga berupaya membuat produk pengetahuan PRISMA tersedia lebih luas. Universitas-universitas tersebut menganggap pembelajaran dari PRISMA sebagai hal penting untuk mempercepat upaya mereka dalam memperbaiki dan memperbarui bahan ajar, referensi penelitian, dan desain kurikulum.

UB sedang dalam proses menyimpan dan mengunggah produk pengetahuan PRISMA ke dalam repositori universitas dan diharapkan akan tersedia untuk umum mulai Agustus 2024. Untuk memaksimalkan manfaat dan aksesibilitas produk pengetahuannya, tim perpustakaan UB sedang membuat metadata untuk setiap dokumen, menetapkan kata kunci yang sesuai dengan mata kuliah yang ada di beberapa fakultas, bukan hanya di fakultas pertanian dan peternakan. Sebagai hasilnya, mahasiswa dan pengajar dari berbagai departemen akan dapat lebih mudah mengakses dan mencari dokumen-dokumen tersebut.

UB juga telah mendorong berbagai upaya untuk mengintegrasikan praktik cerdas iklim ke dalam program akademiknya. Hasil uji coba ECB yang masih berlangsung dan uji coba kandang closed-house untuk sapi yang telah selesai sedang diintegrasikan ke dalam pengembangan protokol baru untuk uji coba praktik cerdas iklim yang akan rampung pada bulan Juli 2024. UB sedang mempersiapkan lokakarya pada bulan Agustus 2024, di mana para dosen dan peneliti akan membahas cara mengintegrasikan protokol dan praktik cerdas iklim ke dalam kelas dan penelitian di UB.

Fakultas peternakan UNWM membuat perubahan signifikan pada mata kuliah kewirausahaannya dengan mengubah namanya menjadi Agrotechno Business. Mata kuliah ini akan mengintegrasikan pendekatan MSD PRISMA, pembelajaran dari program inkubator bisnis UNWM, dan wawasan dari berbagai diskusi dan lokakarya dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan sektor swasta. Selama lokakarya pada bulan Juni 2024, rektor UNWM dan perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII memuji proses pengembangan kurikulum Agrotechno Business dengan menyebutnya sebagai praktik terbaik yang menginspirasi universitas lain untuk terus meningkatkan kurikulum mereka dan memastikannya lebih selaras dengan kebutuhan industri. Mata kuliah ini akan resmi diluncurkan pada bulan Agustus 2024 dan akan menerima angkatan mahasiswa pertamanya pada tahun akademik 2024/2025 mendatang.

## Refleksi/Pembelajaran Penting



Bekerja sama dengan berbagai universitas dapat secara signifikan mempercepat proses memperluas pengetahuan dan sosialisasi pembelajaran kepada audiens yang lebih luas. PRISMA melakukan studi pasar dan penelitian melalui kolaborasi dengan berbagai universitas, serta membantu mitra universitasnya memahami bagaimana kegiatan tersebut selaras dengan misi institusi mereka. Hal ini berhasil meningkatkan rasa kepemilikan dan memberikan insentif yang lebih besar bagi mitra universitas untuk membagikan pengetahuan dari studi pasar dan penelitian tersebut melalui platform mereka sehingga dapat diakses oleh audiens yang lebih luas.



Peluncuran kurikulum Agrotechno Business yang mengadopsi pendekatan MSD antara UNW - PRISMA - DFAT.

### Sumber Bukti

1. Triple Helix Research Group dari Stanford University (2011), *The Triple Helix Concept*.
2. Anatan, L. (2008). Kolaborasi universitas-industri: *Tinjauan konseptual mekanisme transfer pengetahuan dari universitas ke industri*. *Jurnal Manajemen*, 8(1), 1-12.

## Inisiatif kebijakan

Bappenas merumuskan agenda pembangunan sektor pangan dan pertanian tahun 2025–2029 dalam RPJMN berdasarkan bukti kebijakan yang kuat.

### Konteks

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini tengah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029. RPJMN tahun 2025–2029 menguraikan arah dan prioritas pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan serta menyelaraskannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025–2045 yang bertujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045.<sup>1</sup> RPJMN Tahun 2025–2029 secara khusus menekankan pengoptimalan peran dan partisipasi aktor nonpemerintah, termasuk sektor swasta, dalam proses perumusan dan pengimplementasian kebijakan.<sup>2</sup> Sebagai strategi nasional yang komprehensif, RPJMN mencakup seluruh sektor pembangunan strategis, termasuk pangan dan pertanian, dan Bappenas kini aktif mengoordinasikan Kementerian/Lembaga untuk mengembangkan RPJMN tersebut.<sup>3</sup> Agenda pembangunan sektor pangan dan pertanian dalam RPJMN akan mengarahkan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam merumuskan rencana strategisnya (Renstra) untuk tahun 2025–2029.<sup>4</sup>

Proses penyusunan RPJMN untuk agenda pembangunan sektor pangan dan pertanian dimulai dengan studi latar belakang yang dikerjakan oleh Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas dan digunakan untuk mendukung rancangan teknokratik RPJMN.<sup>5</sup> Sebelumnya, sebagian besar kajian pendahuluan dikembangkan melalui diskusi dengan pejabat publik dan beberapa ahli.



*Ini [studi latar belakang] bukanlah akhir, melainkan suatu permulaan dari proses kebijakan untuk memodernisasi pertanian.*

**Jarot Indarto,**

Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas, dalam pidato penutup diskusi kebijakan RPJMN Modernisasi Pertanian pada tanggal 14 September 2023.



*Langkah-langkah yang telah kita ambil dalam lokakarya multipihak telah menjadi landasan kokoh perumusan RPJMN.*

**Jarot Indarto,**

dalam Kata Pengantar Studi Latar Belakang RPJMN 2025-2029.

Hingga Juli 2024, Bappenas telah merampungkan rancangan teknokratik dan sedang dalam proses finalisasi rancangan awal RPJMN yang akan diterbitkan pada bulan Oktober 2024. Setelah rancangan awal RPJMN selesai, rancangan tersebut akan disampaikan kepada presiden baru untuk mengintegrasikan visinya, dan RPJMN akhir akan ditetapkan pada bulan Januari 2025.<sup>6</sup> Sebagai bagian dari rancangan awal, RPJMN 2025-2029 turut melibatkan pengembangan indikator seputar modernisasi pertanian. Untuk memastikan indikator yang relevan serta keselarasan yang lebih baik antara RPJMN dan Renstra Kementan, peningkatan koordinasi antara Bappenas dan Kementan dalam penyusunan indikator RPJMN perlu dilakukan.



## Dukungan PRISMA

Mengingat Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas memiliki tanggung jawab langsung dalam mengembangkan agenda pembangunan pangan dan pertanian RPJMN, PRISMA berada dalam posisi strategis untuk mendukung direktorat tersebut melalui pembelajaran dan pengetahuannya yang mendalam guna mengarahkan serta memperkuat agenda pertanian baru. Tujuannya adalah memastikan Bappenas menerima bukti kebijakan yang kuat berdasarkan wawasan pasar dan dialog kebijakan publik untuk membentuk agenda pembangunan pangan dan pertanian RPJMN, memastikan agenda tersebut secara efektif mengatasi beragam kebutuhan dan tantangan Indonesia.

PRISMA mewujudkannya dengan (a) mendukung Bappenas dalam melakukan studi latar belakang mengenai modernisasi dan ketahanan pertanian di Indonesia, yang mengidentifikasi kendala utama dan intervensi prioritas untuk mempercepat modernisasi sektor pertanian Indonesia; (b) mengembangkan indikator modernisasi pertanian untuk RPJMN dan memastikan keselarasan antara indikator RPJMN dan Renstra Kementan; dan (c) mengembangkan studi kebijakan yang komprehensif di area tematik utama. Berbagai area dukungan ini didasarkan pada permintaan khusus dari Bappenas. Studi dan rekomendasi tersebut memadukan pengetahuan dan wawasan PRISMA sekaligus menghadirkan perspektif tambahan melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dengan sektor swasta dan akademisi.



## Pencapaian Utama

Studi latar belakang dikembangkan melalui tiga lokakarya konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan pada tahun 2023, termasuk satu lokakarya di tingkat nasional dan dua lokakarya regional di kawasan timur dan barat Indonesia untuk mengintegrasikan perspektif dari pasar maju dan berkembang. Temuan dan rekomendasi dari lokakarya regional dibahas dan dirangkum dalam lokakarya pleno tingkat nasional pada bulan September 2023 dan digunakan untuk mengarahkan rancangan akhir studi latar belakang untuk Bappenas, yang diselesaikan pada bulan Januari 2024. Lokakarya tersebut mendorong diskusi interaktif dan intensif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, asosiasi pertanian, peneliti, organisasi internasional, lembaga keuangan, dan perwakilan sektor swasta.

Studi latar belakang tersebut diterima baik oleh Bappenas, yang kemudian mendorong Bappenas untuk meminta dukungan tambahan dari PRISMA dalam mengembangkan indikator modernisasi pertanian untuk RPJMN. Untuk mengembangkan indikator tersebut, dua lokakarya telah dilakukan bersama Bappenas dan indikator tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2024. Meskipun studi latar belakang tersebut telah mencakup area prioritas pertanian secara menyeluruh, Bappenas membutuhkan wawasan lebih jauh tentang topik-topik spesifik untuk melengkapi rancangan awal RPJMN. Oleh karena itu, PRISMA saat ini mengembangkan empat studi kebijakan mendalam di area tematik utama (yaitu ketersediaan benih tanaman pangan berkualitas, regenerasi petani muda, digitalisasi pertanian, dan pertanian cerdas iklim) yang muncul dari studi latar belakang dan area keahlian PRISMA. Studi ini, yang nantinya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan lebih mendukung rancangan awal RPJMN ini, juga akan rampung pada bulan Agustus 2024.

## Refleksi/Pembelajaran Penting



Dengan adanya pengetahuan sektor swasta yang mendalam tentang dinamika pasar dan realitas operasional, perspektif sektor ini memberikan wawasan yang sangat berharga dalam mengembangkan kebijakan. Dengan melibatkan suara sektor swasta, pembuat kebijakan dapat mengatasi tantangan khusus industri dengan lebih baik dan memanfaatkan kesempatan yang muncul sekaligus menyusun kebijakan yang lebih efektif dan responsif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Contohnya, dengan berkonsultasi dengan perusahaan benih swasta, pemerintah menjadi lebih sadar akan potensi penggunaan saluran komersial untuk mengirimkan benih berkualitas dan saat ini tertarik untuk bermitra dengan lebih banyak perusahaan benih swasta.

### Sumber Bukti

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (2004).
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (28 Desember 2023). *Bappenas Kumpulkan Masukan untuk RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 Lebih Berkualitas*. Bappenas.
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*, Pasal 7, ayat 1-4.
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*, Pasal 10, 12, dan 13.
5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*, Pasal 8 dan 9.
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*, Pasal 17 dan 18.



## Inisiatif kebijakan

# Kementerian Pertanian mereformasi dan mengimplementasikan standar pakan sapi yang direvisi

## Konteks

Indonesia bergantung pada 4,8 juta peternak sapi potong skala kecil untuk memproduksi daging sapi demi ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi negara. Untuk mendukung para peternak ini, PRISMA bekerja sama dengan perusahaan pakan untuk memproduksi dan menjual pakan bermutu dengan harga terjangkau serta mengedukasi mereka mengenai praktik peternakan yang baik. Namun, Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pakan Ternak menjadi hambatan bagi pabrik pakan, terutama pabrik skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan mayoritas produsen pakan, dalam menjual pakan sapi bermutu dengan harga terjangkau secara legal. SNI yang ada saat ini menetapkan beberapa kriteria yang dapat dipenuhi oleh pakan kelas premium. Hanya pabrik pakan besar yang mampu membeli bahan dasar untuk memenuhi standar ini. Akibatnya, harga pakan yang diproduksi sering kali tidak terjangkau bagi peternak skala kecil. Kebuntuan kebijakan ini tidak hanya menghambat pertumbuhan perusahaan pakan, tetapi juga membatasi potensi peternak skala kecil untuk meningkatkan produktivitas ternak dan pendapatan mereka.

*Saya ingin berterima kasih kepada PRISMA. Semua yang telah kita capai bersama sangat luar biasa, meskipun baru dimulai sejak 2021...Kami telah menyelesaikan penilaian SNI pada bulan Desember lalu. Kami juga sudah menyelesaikan sistem penilaian CPPB dua kelas. Sekarang, kami sedang menyederhanakan tiga peraturan Kementerian Pertanian menjadi satu agar lebih efektif.*

**drh. Nur Saptahidayat,**  
Direktur Pakan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.



Penyerahan plakat dan sertifikat oleh Direktur Pakan Ternak Kementerian Pertanian sebagai bentuk pengakuan atas dukungan PRISMA pada tanggal 28 Mei 2024.

## Dukungan PRISMA

PRISMA mendukung Direktorat Pakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mereformasi SNI tahun 2017 untuk pakan konsentrat sapi agar lebih fleksibel dan ramah bisnis bagi pabrik pakan UMKM dan peternak skala kecil. Selain mereformasi standar tersebut dan memastikan bahwa Kementerian Pertanian memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan dan meninjau kembali standar dan peraturan yang baru, dukungan ini juga bertujuan agar pabrik pakan UMKM memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mematuhi SNI yang baru.

PRISMA melakukan hal ini dengan (a) menyusun ringkasan kebijakan dan mengadakan dialog kebijakan untuk meyakinkan Kementerian Pertanian agar meninjau ulang SNI pakan ternak serta memberikan rekomendasi teknis kepada Kementerian Pertanian; (b) memfasilitasi penyusunan peraturan Kementerian Pertanian (tentang registrasi dan distribusi pakan, cara pembuatan pakan yang baik, dan penerapan SNI yang wajib) dan pedoman pelatihan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan di industri terkait dan universitas; dan (c) menyosialisasikan SNI yang telah direvisi untuk sapi potong dan sapi perah serta menyelenggarakan sesi pelatihan dan menyediakan materi untuk mendukung peningkatan kapasitas pabrik pakan dan pengawas pakan pemerintah berdasarkan pedoman pelatihan yang baru.



## Pencapaian Utama

Upaya advokasi PRISMA berhasil mendorong Kementerian Pertanian dan Badan Standar Nasional (BSN) untuk menyertakan kajian SNI pakan ternak dalam Program Perumusan Standar Nasional tahun 2022. SNI baru untuk pakan ternak sapi yang mengintegrasikan rekomendasi dari PRISMA untuk memperkenalkan sistem penilaian pakan diterbitkan pada bulan Desember 2022. Penerapan SNI ternak yang sempat tertunda akibat penambahan indikator baru yang tidak termasuk dalam usulan SNI awal yang didukung PRISMA akan dimulai pada bulan Agustus 2024.

Meskipun PRISMA hanya bermaksud mengubah SNI pakan ternak untuk sapi, hal ini memacu Kementan untuk meninjau kembali SNI pakan ternak lainnya (ayam, bebek, babi, dan burung puyuh) dan menyederhanakan semua regulasi pakan. Sebagai hasilnya, SNI baru untuk ternak lainnya juga dirilis pada bulan Desember 2022 dan sudah mulai diterapkan. Hal ini juga mendorong Bappenas untuk mengalokasikan dana hibah yang diberikan satu kali sebesar Rp111.000.000.000 pada tahun 2023 guna meningkatkan fasilitas laboratorium pemerintah di Bekasi. Kementan telah merevisi tiga peraturan pakan utama yang diharapkan akan disetujui dan diterapkan pada tahun 2024. Peraturan-peraturan ini berpotensi mengubah paradigma di sektor peternakan Indonesia sehingga membuka peluang bagi 13,6 juta peternak.

Untuk membekali pemerintah dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan guna menerapkan SNI baru secara efektif, PRISMA mendukung pengembangan pedoman pelatihan untuk pengawas mutu pakan dan perusahaan pakan serta sertifikasi 12 auditor Kementan dan pelatihan bagi 350 pengawas mutu pakan. Sejak bulan Mei 2024, para auditor dan pengawas mutu pakan telah memberikan bimbingan teknis kepada perusahaan pakan, khususnya UMKM, untuk membantu mereka mematuhi SNI baru dan memproduksi pakan bersertifikat dengan harga terjangkau bagi peternak. Upaya ini telah berhasil membantu 27 perusahaan memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) sejak bulan Juni 2024, sehingga total terdapat 146 NPP.



## Refleksi/Pembelajaran Penting



**Keberhasilan dalam mengubah kebijakan sektor dapat membuka peluang perubahan kebijakan yang lebih luas di luar fokus sektor tersebut.** Keberhasilan PRISMA dalam mengubah SNI terkait pakan sapi mendorong Kementan untuk meninjau standar pakan terhadap semua jenis ternak dan menyederhanakan semua regulasi pakan untuk implementasi yang efektif (sertifikasi, registrasi, dan waktu perizinan), termasuk mengatasi kesenjangan kapasitas di dalam pemerintah dan industri. Hal ini mengubah industri pakan Indonesia dan meningkatkan ketahanan pasar ternak.



Hambatan terhadap kebijakan dapat muncul pada berbagai tahap pengembangan sektor sehingga memerlukan penilaian berkelanjutan. Pada awalnya, hanya terdapat 2% peternak sapi yang menggunakan pakan konsentrat, yang menyebabkan lemahnya penegakan NPP dan lisensi SNI. Seiring berkembangnya sektor ini dan semakin banyaknya perusahaan yang memasuki pasar, denda karena ketiadaan NPP meningkat, dan kepatuhan terhadap SNI yang ada menjadi hambatan bagi produsen pakan skala UMKM dan pertumbuhan pasar.



*Uji coba molases blok pada sapi di Tulungagung.*

## Inisiatif kebijakan

# Pemerintah dan akademisi meningkatkan kapasitas implementasi pengembangan sistem pasar (*Market System Development/MSD*)

## Konteks

Indonesia, dengan 25,90 juta penduduk yang hidup dalam kemiskinan atau 9,36% dari populasi,<sup>1</sup> secara historis mengandalkan inisiatif pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menyadari potensi sektor swasta untuk membantu mengurangi kemiskinan dan tertarik untuk berkolaborasi secara lebih intens dengan sektor swasta.<sup>2</sup> Meskipun hal ini telah mendorong Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas untuk mengintegrasikan konsep kemitraan Triple Helix (pemerintah, akademisi, industri) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, kolaborasi dengan sektor swasta masih merupakan area yang baru bagi pemerintah dan akademisi.

Dalam konteks ini, kisah sukses PRISMA yang luar biasa tidak hanya menarik minat Bappenas terhadap pendekatan MSD, tetapi juga menanamkan keyakinan bahwa pendekatan ini dapat membantu pemerintah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan lebih efektif. PRISMA telah membuktikan bahwa bekerja sama dengan sektor swasta di beberapa provinsi termiskin di Indonesia dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan pertanian dan pendapatan bagi rumah tangga petani miskin. Melalui kemitraan dengan 273 entitas, di mana 66% di antaranya berasal dari sektor swasta, PRISMA telah menghasilkan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 145,6% bagi 1,45 juta petani skala kecil.

*Saya berharap semua peserta telah memperoleh hal-hal positif dari PRISMA dan pendekatan sistem pasar yang holistik. Pemerintah membutuhkan pendekatan inovatif, dan kami mengharapkan semua peserta di sini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertanian nasional.*

**Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D.**  
Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas.



Penyerahan sertifikat pelatihan kepada peserta dari Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas (Jarot Indarto, S.P., M.T., M.Sc., Ph.D.) dan CEO PRISMA.



## Dukungan PRISMA

Mengingat keahlian dan keberhasilan PRISMA dalam pendekatan MSD, Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas telah meminta PRISMA untuk mendukung peningkatan kapasitas MSD baik di tingkat pemerintahan maupun akademisi. PRISMA memenuhi permintaan ini dengan (a) mengembangkan pedoman nasional dan materi pelatihan untuk merancang dan melaksanakan program MSD sebagai modalitas bantuan potensial dan (b) menyelenggarakan pelatihan MSD bagi pejabat pemerintah dan akademisi. Inisiatif ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pemangku kepentingan pemerintah dan universitas tentang pendekatan MSD, serta alat praktis yang dapat digunakan dan diterapkan secara langsung.



## Pencapaian Utama

Pada bulan November 2023, PRISMA telah menyelesaikan pedoman MSD nasional, yaitu Program Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pengembangan Sektor Pertanian Berbasis Pendekatan Sistem Pasar. Materi pelatihan MSD, yang meliputi panduan tentang proses penilaian pasar, mengidentifikasi hambatan utama, mengembangkan intervensi, menentukan metode pemantauan dan evaluasi yang sesuai, dan menilai tanda-tanda keberlanjutan pasar, telah diselesaikan pada bulan Juni 2024. Tidak lama setelah selesai, pedoman dan materi pelatihan ini digunakan dalam pelatihan MSD untuk pejabat pemerintah dan akademisi. Pedoman dan materi tersebut juga digunakan oleh Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram sebagai referensi untuk mengembangkan kurikulum untuk mata kuliah Agritechno Business, yang rencananya akan diluncurkan pada bulan Agustus 2024.

Pelatihan MSD pada bulan Juni 2024 merupakan program pelatihan selama lima hari yang melibatkan 23 peserta (18 pejabat pemerintah, 4 profesor universitas, dan 1 perwakilan DFAT). Pelatihan ini terdiri dari sesi pemberian materi dan tugas kelompok langsung. Hampir semua peserta (95%) melaporkan adanya peningkatan pemahaman mengenai pendekatan MSD. Selain itu, semua peserta menyatakan bahwa mereka memahami nilai kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. Pada upacara penutupan, Bapak Jarot Indarto, Kepala Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, memberikan sertifikat pelatihan kepada para peserta dan memuji hasil pelatihan PRISMA. Beliau juga mendorong para peserta untuk bekerja sama dalam menerapkan prinsip-prinsip MSD di Indonesia.

Meskipun masih terlalu dini untuk menilai dampak pelatihan terhadap program pemerintah dan kemitraan triple helix, separuh dari lulusan pelatihan telah mengembangkan rencana aksi pascapelatihan. Rencana aksi ini mencakup pengintegrasian pendekatan MSD ke dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektor (mis., sektor perikanan dan keuangan), pengembangan kurikulum pendidikan, serta sistem pemantauan dan evaluasi. Selain itu, sepertiga dari para lulusan pelatihan berencana untuk membagikan informasi tentang MSD kepada kepala kantor, manajer, dan kolega mereka. Melalui tindakan proaktif ini, para lulusan tersebut telah menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan MSD ke dalam pekerjaan mereka dan membagikan pendekatan tersebut secara lebih luas.



## Refleksi/Pembelajaran Penting



Kegiatan pascapelatihan, seperti pengembangan rencana aksi, perlu diterapkan setelah melaksanakan pelatihan. Pengetahuan yang mendalam terkait MSD memang penting, tetapi pengetahuan tanpa diikuti tindakan tidak ada artinya. Pemahaman para lulusan pelatihan akan memudar seiring waktu dan pelatihan tidak akan memiliki dampak yang lebih besar jika mereka tidak menerapkan pengetahuan yang baru mereka peroleh.



Pelatihan MSD PRISMA di Surabaya.

## Sumber Bukti

1. Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.
2. Ihsanuddin, & Erdianto, K. (2020, Maret 4). *Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang pada 2024*. Kompas.com.

## Inisiatif kebijakan

# Kementerian Pertanian mempercepat adopsi Inseminasi Buatan (IB) di sektor babi dengan meningkatkan standar dan prosedur operasi untuk semen babi serta standardisasi pelatihan IB dan sertifikasi untuk inseminator

## Konteks

Pada tahun 2019, wabah Demam Babi Afrika (*African Swine Fever/ASF*) melanda Indonesia, dimulai dari Sumatra Utara. Wabah ini menyebar ke 23 dari 34 provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sektor babinya sedang mendapatkan intervensi dari PRISMA.<sup>1</sup> ASF diperkirakan menyebabkan penurunan 10% populasi babi di Indonesia dan memiliki dampak yang bervariasi di setiap provinsi.<sup>2</sup> Di NTT saja, ASF telah membinasakan 40-50% populasi babi. Seiring dengan upaya pemulihan Indonesia dari ASF, repopulasi babi yang bebas dari penyakit ini harus segera dilakukan.<sup>3</sup> Inseminasi buatan (IB) dapat membantu mempercepat repopulasi di sektor babi karena metode ini menawarkan beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan perkawinan alami, seperti meningkatkan kecepatan reproduksi babi, menurunkan risiko penularan penyakit, dan memungkinkan penggunaan semen dari pejantan unggulan untuk membuahi banyak induk babi.<sup>4</sup>

*Kami berterima kasih kepada PRISMA atas dukungannya dalam penyusunan SNI untuk semen beku babi karena proses tersebut memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan agar pekerjaan terkait menjadi lebih mudah. Di industri peternakan babi, para peternak kami menghadapi tantangan serius karena dampak ASF. Oleh karena itu, kita harus segera bangkit dan menyediakan lingkungan yang mendukung, termasuk dengan menetapkan SNI untuk semen beku babi.*

**Agus Susanto,**

Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.



Pengesahan SKK Khusus oleh Sekretaris BPPSDMP Kementerian Pertanian (Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.) pada tanggal 30 Mei 2024, disaksikan oleh Kepala BBPP Kupang, Kepala BBPP Batu-Malang, dan CEO PRISMA.

Meski IB untuk babi sudah ada di Indonesia, penggunaannya sebagian besar masih terbatas untuk penelitian di universitas dan peternakan pemerintah atau oleh peternakan komersial besar untuk operasional mereka sendiri. Sebagian besar semen babi yang tersedia cenderung berupa semen segar, meski beberapa peternakan komersial besar di Jawa Timur dan Bali juga menggunakan semen beku impor. Adopsi IB secara luas di Indonesia menghadapi sejumlah kendala, termasuk kurangnya inseminator babi yang terampil (misalnya, di NTT, inseminator babi hanya mampu melayani sekitar 7% dari total induk di provinsi tersebut) serta tidak adanya standar regulasi atau prosedur operasi untuk jenis-jenis semen babi tertentu.



## Dukungan PRISMA

PRISMA mendukung Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat adopsi inseminasi buatan di sektor babi. Upaya ini bertujuan meningkatkan akses peternak terhadap inseminator terampil guna mendukung pemulihan sektor babi dan mendorong perusahaan pembibitan babi untuk memproduksi semen babi berkualitas tinggi bagi peternak.

Untuk tujuan tersebut, PRISMA memfasilitasi proses pengembangan (a) kurikulum nasional dan modul pelatihan inseminator babi, serta pedoman operasional untuk lembaga pendidikan dan pelatihan; (b) standar kompetensi kerja khusus untuk inseminator (SKK Khusus) yang akan digunakan untuk menyertifikasi inseminator di seluruh Indonesia; dan (c) Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk semen beku babi dan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk menyertifikasi semen beku babi dari produsen semen.



## Pencapaian Utama

Upaya kolaboratif PRISMA, BBPP Kupang (Balai Besar Pelatihan Peternakan), BPPSDMP (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian), asosiasi industri babi dan veteriner, universitas, dan para ahli berhasil mengembangkan kurikulum nasional dan modul untuk pelatihan inseminator babi, pedoman operasional untuk lembaga pendidikan dan pelatihan, serta standar kompetensi kerja untuk inseminator.

Dalam lokakarya multipihak pada bulan Juli 2023, BBPP Kupang ditunjuk sebagai mitra pemerintah yang bertanggung jawab memimpin pengembangan materi pelatihan dan pedoman operasional inseminasi buatan untuk lembaga pendidikan dan pelatihan. Setelah kurikulum pelatihan dan modul disusun, BBPP Kupang melakukan uji coba pelatihan inseminasi buatan untuk 32 inseminator dari 10 kabupaten di NTT, peternakan milik pemerintah di Kupang, dan BIBD (Badan Inseminasi Buatan Daerah) di Bali. Hasil uji coba tersebut serta konsultasi tambahan dengan para ahli digunakan untuk meningkatkan kurikulum dan modul terkait.

Demikian pula, penyusunan standar kompetensi kerja khusus juga telah melalui proses yang ketat dan mengharuskan diadakannya empat lokakarya multipihak, yang berpuncak pada lokakarya perumusan standar terkait pada bulan Maret 2024. Pada bulan Juni 2024, Kepala BPPSDMP mengesahkan SKK Khusus tersebut. BPPSDMP kini tengah menunggu nomor registrasi final untuk SKK Khusus ini dari Kementerian Ketenagakerjaan, yang diharapkan akan diterbitkan pada bulan Agustus 2024. Setelah nomor registrasi tersebut diterbitkan, kurikulum pelatihan juga akan diakui secara resmi sebagai kurikulum nasional.

Secara paralel, dengan dukungan dari PRISMA, Dinas Peternakan Provinsi NTT dan para ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Udayana telah menyusun SNI untuk semen beku babi dan SOP untuk mengesahkan semen beku babi dari produsen semen. Setelah menyelesaikan tiga tahap konsepsi, teknis, dan rapat konsensus, rancangan final SNI untuk semen beku babi tersebut disahkan oleh Kepala PSIPKH (Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementan) dan diserahkan ke BSN (Badan Standardisasi Nasional). SNI diharapkan akan dikeluarkan oleh BSN pada bulan September 2024. SOP untuk sertifikasi semen beku babi diharapkan akan selesai pada bulan Juli 2024 dan akan diserahkan kepada Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) di Kementan.

## Refleksi/Pembelajaran Penting



Mengidentifikasi lembaga pemerintah yang tepat, memahami proses birokrasinya, dan memastikan komunikasi yang transparan menjadi faktor penting untuk mencapai hasil yang optimal. Namun, upaya tersebut dapat memakan banyak waktu. Meskipun diskusi telah sering dilakukan bersama dengan Dinas Peternakan Provinsi, sekolah kejuruan, dan universitas di NTT, PRISMA masih membutuhkan hampir 1,5 tahun untuk mengidentifikasi lembaga pemerintah yang sesuai. Baru pada lokakarya Kurikulum Inseminasi Buatan pada bulan Juli 2023, PRISMA akhirnya menentukan BBPP Kupang sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelatihan inseminator di seluruh negeri. Selain mengidentifikasi lembaga pemerintah yang tepat, pengembangan kebijakan dapat dipercepat secara signifikan dengan memperoleh pemahaman mendalam tentang peraturan internal dan proses birokrasi, membangun jaringan melalui para ahli dan konsultan, serta membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan pemangku kepentingan pemerintah terkait.



Mengingat keterbatasan waktu yang dihadapi program, pertimbangan akan kelebihan dan kekurangan dalam mengikuti berbagai proses kebijakan sering kali diperlukan. Untuk sertifikasi kompetensi inseminator, PRISMA awalnya mengejar Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Namun, persetujuan SKKNI dapat memakan waktu hingga 1-2 tahun. Sebaliknya, standar kompetensi kerja khusus (SKK Khusus) dapat disetujui dalam waktu 6 bulan. Namun, hal ini akan membatasi pihak-pihak yang dapat melakukan sertifikasi inseminator (misalnya, hanya Kementerian Pertanian dan lembaga-lembaganya, bukan universitas atau sekolah kejuruan). Mengingat PRISMA berada di tahun terakhirnya dan memiliki waktu yang terbatas untuk mendorong perubahan ini, tim memutuskan untuk beralih ke proses SKK Khusus meskipun standar tersebut tidak akan dapat diterapkan secara luas.

## Sumber Bukti

1. FAO. (22 Agustus 2024). *African swine fever (ASF) situation update in Asia & Pacific*.
2. Kolambani, F. U., Dyanasari, & Gunawan, C. I. (2022). *Impact of African Swine Fever (ASF) on the Pig Population in Indonesia*. Universitas Tribhuwana Tungadewi.
3. FAO. (2022). *Guidelines for African Swine Fever (ASF) prevention and control in smallholder pig farming in Asia: Farm biosecurity, slaughtering and restocking*.
4. Pemerintah Queensland. (22 November 2022). *Advantages and disadvantages of artificial insemination of pigs*. Business Queensland.

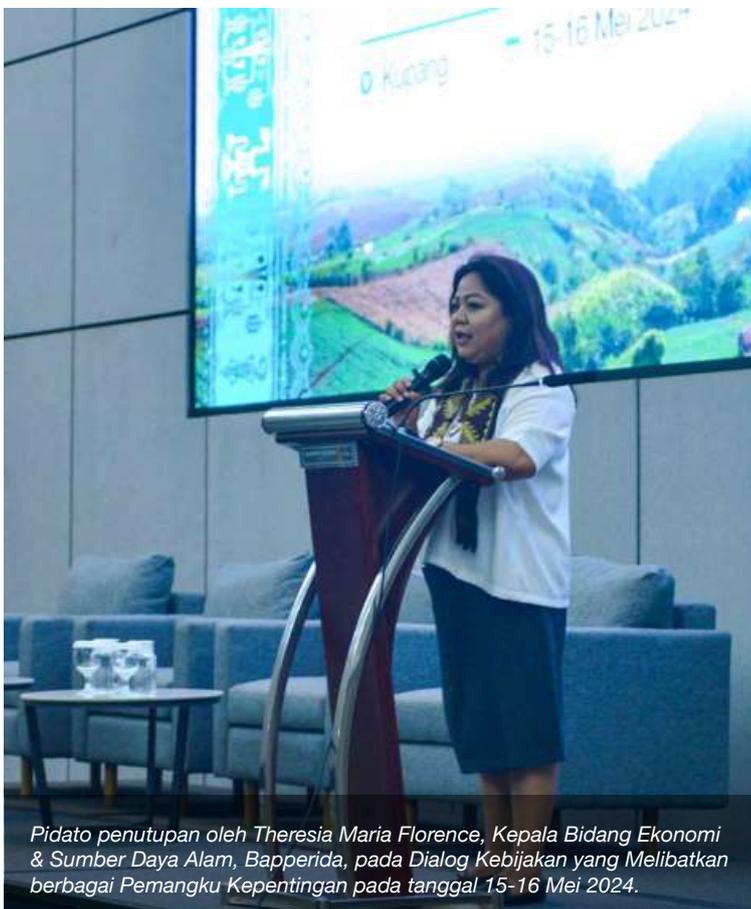
## Inisiatif kebijakan

# Pemerintah Provinsi NTT merumuskan RPJMD 2025-2029 untuk sektor pertanian menggunakan wawasan kebijakan dan pengolahan data yang lebih baik dengan melibatkan bukti dan informasi sistem pasar dari intervensi PRISMA

## Konteks

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 bertujuan agar NTT, salah satu provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan sekitar 20% selama dekade terakhir,<sup>1</sup> menjadi pusat pariwisata internasional dan ekonomi kreatif. Sektor pertanian, yang menyumbang hingga 29% dari produk domestik regional bruto (PDRB),<sup>2</sup> diharapkan dapat mendukung tujuan transformasi ekonomi daerah tersebut. Pada semester pertama tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) NTT mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTT tahun 2025-2029, yang merupakan fondasi penting untuk mencapai tujuan RPJPN dalam lima tahun ke depan.

Meski pemerintah NTT memiliki banyak pengalaman dalam mempromosikan pembangunan melalui program subsidi, mereka kini menyadari perlunya pasar komersial yang aktif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena ini merupakan hal baru bagi Bapperida, saat ini mereka kekurangan wawasan dari sektor swasta dan data yang diperlukan untuk memprioritaskan wilayah target dalam mengembangkan pasar komersial. Selain itu, mereka juga memerlukan dukungan dari pemerintah pusat karena aturan dan regulasi nasional juga memengaruhi pertumbuhan pasar komersial di NTT.



Pidato penutupan oleh Theresia Maria Florence, Kepala Bidang Ekonomi & Sumber Daya Alam, Bapperida, pada Dialog Kebijakan yang Melibatkan berbagai Pemangku Kepentingan pada tanggal 15-16 Mei 2024.



*Proses ini merupakan 'terobosan' kelembagaan yang inovatif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi demi mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk kebijakan di NTT di masa mendatang.*

**Jarot Indarto,**  
Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas.



*Dukungan pembuatan peta digital berbasis Power-BI oleh PRISMA akan sangat membantu Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat merumuskan kebijakan di masa mendatang.*

**Theresia Maria Florence,**  
Kepala Bidang Ekonomi & Sumber Daya Alam, Bapperida NTT.



## Dukungan PRISMA

Karena PRISMA memiliki pengalaman selama satu dekade dalam mengembangkan pasar pertanian di NTT, termasuk dalam komoditas strategis seperti sapi potong, babi, dan jagung, PRISMA memiliki banyak pelajaran dan pengetahuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan memperkuat agenda pertanian provinsi. Berdasarkan permintaan dari Bapperida, PRISMA mendukung Bapperida dalam mempersiapkan perencanaan partisipatif dan teknokratik RPJMD NTT tahun 2025-2029 untuk sektor pertanian. Tujuannya adalah memberikan Bapperida wawasan dan data kebijakan yang lebih baik, khususnya wawasan dan rekomendasi untuk lingkungan yang mendukung bisnis guna mendorong investasi sektor swasta, pertumbuhan pasar, dan pergeseran dari pertanian subsisten ke pertanian komersial.

PRISMA melakukannya dengan (a) mengembangkan alat perencanaan untuk mendukung identifikasi wilayah target dalam mengembangkan pasar komersial dan pengembangan strategi yang sesuai; (b) melakukan studi tentang dukungan sektor pertanian terhadap tujuan daerah jangka panjang dan mengadakan dialog kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengumpulkan masukan dan perspektif tambahan; (c) merumuskan rekomendasi untuk strategi, program, dan kegiatan pengembangan pasar pertanian NTT dari 2025 hingga 2029; dan (d) mengembangkan dan menyosialisasikan ringkasan kebijakan untuk mengadvokasi dukungan pemerintah pusat terhadap prioritas NTT.



## Pencapaian Utama

Studi tentang dukungan sektor pertanian terhadap tujuan jangka panjang NTT dimulai pada Februari 2024. Studi ini mencakup 9 komoditas dengan penelusuran mendalam pada pasar sapi potong, babi, dan jagung sebagai faktor pendorong utama sektor pertanian di NTT. Ringkasan temuan awal dan rekomendasi potensial disajikan dalam dialog kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada bulan Mei 2024. Dialog kebijakan ini juga mengumpulkan masukan dan perspektif tambahan dari pemangku kepentingan publik dan swasta sebagai informasi tambahan untuk agenda pertanian dalam RPJMD 2025-2029.

Selama acara tersebut, Bapperida NTT juga meluncurkan alat perencanaan inovatif yang mengonsolidasikan data dari berbagai instansi pemerintah ke dalam pemetaan visual. Sebelum peluncuran, PRISMA mengadakan pelatihan untuk memperkenalkan alat baru ini kepada staf Bapperida yang diikuti dengan beberapa sesi pembinaan bagi staf tentang cara memperbarui dan mengoperasikan alat tersebut menggunakan data terbaru. Mengingat potensi alat ini untuk membantu Bapperida dalam menentukan wilayah prioritas, mengembangkan strategi untuk komoditas pertanian utama di NTT, dan mengadvokasi dukungan dari pemerintah pusat, Bapperida secara proaktif mengambil peran dalam berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mendapatkan data yang diperlukan alat tersebut.

Berdasarkan temuan awal studi tersebut dan masukan dari dialog kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta pelajaran yang didapatkan oleh PRISMA dari membantu NTT selama satu dekade terakhir dan analisis hasil dari alat perencanaan di atas, PRISMA merumuskan rekomendasi untuk strategi, program, dan kegiatan pertanian dalam RPJMD. Sebuah tabel yang merangkum rekomendasi ini diserahkan kepada Bapperida pada bulan Juli 2024 dan dilengkapi dengan laporan lengkap yang memberikan rincian lebih lanjut mengenai rekomendasi tersebut. PRISMA juga sedang mengembangkan tiga ringkasan kebijakan untuk mendukung Bapperida dalam mengadvokasi dukungan nasional, yang akan disosialisasikan melalui acara-acara di tingkat nasional dan provinsi pada bulan Agustus 2024.

## Refleksi/Pembelajaran Penting



Mengintegrasikan pembelajaran dari suatu program terkait suatu sektor ke dalam proses perencanaan pemerintah dapat menjadi cara yang ampuh untuk memastikan hasil yang lebih berkelanjutan dari sektor tersebut. PRISMA mampu melakukan ini di NTT karena pendekatan pengembangan pasar yang diadopsi sangat relevan untuk pasar yang sepi seperti di NTT yang sangat membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. PRISMA juga memberikan wawasan penting tentang inisiatif yang berhasil dan tidak berhasil di NTT melalui kemitraan selama 10 tahun dalam delapan komoditas sektor. Selain itu, PRISMA mampu mengidentifikasi individu yang sangat berpengaruh di Bapperida dan pemerintah provinsi NTT yang sangat penting untuk menjalin kolaborasi yang lebih kuat. Meski kombinasi faktor-faktor tersebut memungkinkan PRISMA untuk berkontribusi dalam proses perencanaan provinsi NTT, kesempatan seperti ini bisa jadi cukup langka. Selain itu, siklus perencanaan kebijakan biasanya berlangsung selama lima tahun mungkin tidak akan bertepatan dengan kerangka waktu program, dan bahkan jika bertepatan, perlu disadari bahwa kemungkinan besar dampak program tersebut tidak akan dirasakan oleh penerima manfaat.



*Brosur ASF, hasil kerja sama antara PRISMA dan pemerintah daerah NTT.*

### Sumber Bukti

1. BPS. (2023). *Profil Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Maret 2023.
2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Rencana Pembangunan Daerah untuk Nusa Tenggara Timur 2024-2026*.

## Inisiatif kebijakan

## Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sumenep meningkatkan sistem perencanaan subsidi benih jagung

### Konteks

Meski pemerintah provinsi dan daerah telah mempromosikan benih hibrida melalui program subsidi benih mereka, perencanaan subsidi tidak berjalan efisien sehingga sering kali mengakibatkan tumpang tindih yang tinggi antara penerima subsidi dan pengguna benih komersial yang sudah ada. Hal ini menjadi disinsentif bagi perusahaan benih untuk menambah investasi dan terus menjual produknya atau memperluas pasar ke wilayah tertentu. Hal ini menjadi perhatian khusus di daerah yang mulai mengadopsi benih hibrida (seperti Kabupaten Sumenep yang memiliki hingga 85% dari semua penerima subsidi di Madura). Di wilayah lain yang pasar benih hibrida komersialnya lebih kuat (seperti Jawa Tengah), program subsidi benih tidak berkontribusi pada tujuan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas jagung. Selain itu, program ini menyebabkan penyusutan pasar komersial karena perusahaan benih mengurangi produksi mereka.

 *Basis data ini membantu membuat alokasi bantuan benih menjadi lebih tepat.*

**Chaenur Rasyid,**  
Kepala DKPP Sumenep.

 *Pedoman teknis yang baru ini akan mendukung Pemerintah Jawa Tengah dalam mengembangkan daerah-daerah yang membutuhkan pertumbuhan lebih lanjut. Pelajaran yang dipetik dari implementasi di Jawa Tengah dapat direplikasi dalam skema bantuan benih dari anggaran nasional dan/atau di daerah lain.*

**Supriyanto,**  
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.



Acara Sosialisasi Pedoman Jawa Tengah pada tanggal 6–7 Juni 2023.

Sebagai hasilnya, pada Tahap 1, PRISMA memfasilitasi uji coba proof of concept dari tahun 2016–2018 yang merupakan kemitraan pemerintah-swasta antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep dan perusahaan benih. Uji coba ini berhasil mengurangi tumpang tindih antara penerima subsidi dan petani komersial dari 90% pada tahun 2016 menjadi 40% pada tahun 2017 sehingga membuktikan keberhasilan perencanaan subsidi yang cerdas. Namun, tanpa langkah-langkah tindak lanjut (misalnya, pedoman untuk perencanaan subsidi cerdas dan akses yang mudah ke data kunci untuk pengambilan keputusan) untuk melembagakan prinsip-prinsip subsidi cerdas, pemerintah berisiko tidak akan melanjutkan praktik ini, terutama mengingat tingginya tingkat pergantian pegawai di dalam pemerintahan. Mempromosikan inovasi ini di tingkat nasional juga penting karena pedoman dan anggaran untuk program subsidi benih pada akhirnya ditentukan oleh pemerintah pusat.



## Dukungan PRISMA

PRISMA mendukung Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jawa Tengah dan DKPP Sumenep dalam meningkatkan perencanaan dan penargetan program benih jagung gratis mereka. Tujuannya adalah memastikan bahwa praktik subsidi cerdas dilembagakan sehingga meningkatkan kemauan dan kapasitas mitra pemerintah PRISMA untuk terus menerapkan perencanaan subsidi cerdas.

PRISMA melakukannya dengan: (a) mengembangkan basis data dan alat analisis untuk Sumenep dan Jawa Tengah guna menunjukkan tingkat adopsi benih hibrida di berbagai wilayah serta memberikan pelatihan dan pendampingan bagi staf pemerintah untuk memanfaatkan dan memperbaiki basis datanya secara berkala; (b) menetapkan pedoman untuk Sumenep dan Jawa Tengah tentang cara mengidentifikasi wilayah target untuk subsidi dan cara mengidentifikasi mekanisme pengiriman yang sesuai berdasarkan analisis hasil basis data; dan (c) mengumpulkan dan mempromosikan manfaat dari perencanaan subsidi cerdas kepada pemerintah pusat melalui studi dan kebijakan singkat berdasarkan praktik yang diadopsi di Sumenep dan Jawa Tengah.



*Petani jagung di Sumenep.*



## Pencapaian Utama

Setelah uji coba di Sumenep berakhir, DKPP Sumenep melanjutkan upaya untuk meminimalkan tumpang tindih antara penerima subsidi dan petani komersial. Setelah mengenal benih hibrida melalui program subsidi benih, petani menjadi lebih yakin untuk membeli benih tersebut sehingga lebih banyak perusahaan benih menjadi aktif mempromosikan produk mereka di Sumenep. Seiring dengan meluasnya penggunaan benih hibrida ke lebih banyak desa, berkat dukungan PRISMA, DKPP Sumenep mengembangkan sebuah sistem untuk memantau tingkat adopsi dan mengumpulkan data tersebut dalam basis data demi mendukung pemilihan wilayah target alokasi subsidi benih. Setelah PRISMA memfasilitasi sesi berbagi pada bulan Juni 2022 antara DKPP Sumenep dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempromosikan adopsi praktik subsidi cerdas secara lebih luas, Pemerintah Jawa Tengah juga mengembangkan basis data dan alat analisis untuk mengumpulkan data tingkat lapangan.

Pegawai pemerintah Sumenep dan Jawa Tengah telah diberi pelatihan dan pembinaan tentang basis data dan alat tersebut agar mereka mampu secara mandiri memperbarui basis data tersebut setiap tahun dan menganalisis data tersebut untuk perencanaan subsidi. DKPP Sumenep telah melakukan uji coba menggunakan basis data tersebut untuk mengusulkan alokasi subsidi dari anggaran tingkat nasional untuk musim hujan tahun 2024. Pemerintah Jawa Tengah berharap dapat menggunakan basis data tersebut untuk mengalokasikan anggaran subsidi provinsi untuk tahun anggaran 2026 setelah menyelesaikan pengumpulan data dari kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah.

Secara paralel, Distanbun Jawa Tengah mengeluarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) baru pada bulan April 2023 untuk meningkatkan pelaksanaan sistem subsidi benih. Meski JUKNIS tersebut telah disosialisasikan ke 20 kabupaten, pelaksanaannya lebih lambat dari yang diharapkan karena pemerintah provinsi masih perlu mengumpulkan data pendukung dari pemerintah kabupaten dan karena siklus alokasi anggaran tahunan yang tetap. Selain itu, DKPP sedang melembagakan proses pembaruan basis data dan peningkatan alokasi subsidi dalam pedoman yang akan diterbitkan pada akhir bulan Juli 2024. Proses pengambilan pelajaran dari penerapan subsidi cerdas di Sumenep dan Jawa Tengah sedang berlangsung, sementara laporan studi akhir dan ringkasan kebijakan diharapkan dapat disebarluaskan pada akhir bulan Agustus atau awal bulan September 2024.

## Refleksi/Pembelajaran Penting



Terdapat manfaat dan kekurangan dari penggunaan pendekatan *bottom-up vs. top-down* untuk mengubah praktik subsidi, dan keduanya merupakan strategi yang layak. Dalam kasus Sumenep yang menggunakan pendekatan *bottom-up* yang dimulai dengan uji coba *proof of concept* di tingkat kabupaten, uji coba tersebut menghasilkan perubahan yang lebih cepat dan dapat diamati di tingkat petani serta wawasan berharga di tingkat lapangan. Secara administratif, dukungan pemerintah untuk uji coba lebih mudah didapatkan. Kelemahannya adalah pemerintah mungkin kurang memiliki insentif untuk melembagakan pelajaran yang dipetik dari uji coba, terutama jika kegiatan uji coba tersebut mudah direplikasi tanpa pedoman formal. Namun, mengingat pergantian pegawai yang konstan dalam pemerintahan, praktik-praktik baru sangat berisiko untuk dihentikan kecuali telah diresmikan. Ada juga risiko perlambatan dalam perluasan di luar kabupaten uji coba awal. Di sisi lain, pendekatan *top-down* seperti yang dilakukan dengan pemerintah provinsi di Jawa Tengah memiliki keuntungan dalam mengukuhkan perubahan yang diinginkan dalam pedoman formal di awal dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Namun, pendekatan ini juga dapat terhambat oleh pelaksanaan yang lebih lambat di tingkat lapangan akibat negosiasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, proses administratif yang lebih banyak, dan dinamika persaingan prioritas program.



Berbagi pengalaman positif dengan institusi pemerintah lainnya dapat meningkatkan insentif bagi mitra pemerintah untuk melembagakan praktik yang baik. Meski uji coba berhasil, penawaran awal PRISMA kepada Pemerintah Sumenep untuk melembagakan subsidi cerdas tidak mendapatkan perhatian. Ketika PRISMA membagikan pengalaman subsidi cerdas dari Sumenep kepada Pemerintah Jawa Tengah dan menunjukkan cara agar Pemerintah Jawa Tengah dapat mengembangkannya lebih lanjut dan melembagakan konsep tersebut, Pemerintah Sumenep menyadari bahwa pengalamannya dalam memperbaiki sistem subsidi cukup berharga. Alhasil, Pemerintah Sumenep mendapatkan dorongan internal untuk melembagakan praktiknya yang memudahkan proses perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem tersebut dan menarik lebih banyak perhatian terhadap pencapaian positif ini.



*Perwakilan dari Dinas Provinsi Jawa Tengah mengunjungi Syngenta untuk sesi berbagi pengetahuan tentang budidaya jagung dan praktik-praktik terbaik.*

## Pelajari lebih lanjut



Untuk mempelajari lebih lanjut tentang PRISMA dan legasinya, silakan baca Ringkasan Dampak Legasi – Kebijakan dan kumpulan kisah petani atau peternak PRISMA di situs web PRISMA: [www.aip-prisma.or.id](http://www.aip-prisma.or.id).

# PRISMA

---

 Jl. Margorejo Indah I blok  
A-535, Surabaya 60238,  
Indonesia

---

 [info@aip-prisma.or.id](mailto:info@aip-prisma.or.id)

---

 +62 31 8420473

---

PRISMA didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia dan diimplementasikan oleh Palladium, dengan Bantuan Teknis dari Swisscontact, Zurich.

---